



Peranan dan Strategi Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dea Dellia^{1*}, Dwi Ananda², Lilis Apriyaningsih³, Windi Aulia⁴, Dwita Sakuntala^{5*}

¹⁻⁵ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

deadellia36@gmail.com¹, 02dwiananda@gmail.com², lilisapriyaningsih63@gmail.com³,

widyaaulia1133@gmail.com⁴, sakuntaladwita@gmail.com^{5*}

Alamat: 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Korespondensi penulis: sakuntaladwita@gmail.com

Abstract: *The article discusses the role and strategies of the Central Bank and the Government in maintaining financial system stability, which is crucial for the effective functioning of market economies. A stable financial system is essential for rational decision-making regarding resource allocation and enhancing the investment climate. Historical experiences, particularly Indonesia's financial crisis in 1998 and the global financial crisis in 2008, highlight the high costs associated with financial instability and the importance of implementing both microprudential and macroprudential policies to prevent such crises. The Central Bank of Indonesia (Bank Indonesia) plays a vital role in this regard by regulating monetary policy, overseeing financial institutions, and ensuring a robust payment system. It employs various indicators to measure financial stability, including capital adequacy ratios and economic growth metrics. The article emphasizes that stability in the financial system not only fosters investor confidence but also supports efficient financial intermediation, ultimately contributing to sustainable economic growth.*

Keywords: *central bank, monetary policy, financial stability*

Abstrak Artikel ini membahas peran dan strategi Bank Sentral serta Pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yang merupakan aspek krusial untuk efektivitas ekonomi pasar. Stabilitas keuangan penting untuk pengambilan keputusan yang rasional dalam alokasi sumber daya dan meningkatkan iklim investasi. Pengalaman Indonesia selama krisis keuangan 1998 dan dampak dari krisis global 2008 menunjukkan bahwa ketidakstabilan dapat mengakibatkan biaya tinggi bagi negara. Oleh karena itu, penerapan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial sangat diperlukan untuk mencegah krisis di sektor keuangan. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk pengaturan suku bunga dan pengawasan lembaga keuangan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara regulasi, pemantauan risiko, dan penegakan hukum, stabilitas sistem keuangan dapat tercapai, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: bank sentral, kebijakan moneter, stabilitas keuangan

1. LATAR BELAKANG

Stabilitas Keuangan sangat penting bagi semua negara karena berkaitan dengan efektivitas fungsi ekonomi pasar. Kondisi sistem keuangan yang stabil menjadi keharusan bagi pengambilan keputusan yang rasional untuk mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan iklim investasi di negara mana pun. Stabilitas keuangan telah menjadi perhatian bank sentral dan pemerintah dalam upaya mencegah krisis di sektor keuangan, dimana krisis keuangan adalah istilah yang lebih modern untuk menggambarkan kepanikan perbankan, bank run, dan keruntuhan perbankan (Sitorus *et al.*, 2022).

Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya

penyelamatannya. Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. selain itu di tahun 2008 terjadi fenomena krisis keuangan global yang mengakibatkan terguncangnya sistem perekonomian dimana pada saat itu PDB riil menurun 4,3 % dan pengangguran meningkat 5% menjadi 9,5% .Walaupun bukan negara yang paling terdampak akan tetapi Indonesia sebagai negara berkembang tentu turut merasakan dampak dari resesi tersebut. Krisis ekonomi tersebut mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik yang melebihi batas kemampuan negara, menurunkan kepercayaan investor baik asing maupun domestik serta menurunkan kegiatan produksi pada industri yang berbahan baku impor (Soelistyo, 2015). Dengan demikian krisis keuangan yang terjadi mengakibatkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk mengatasi risiko akibat krisis tersebut, maka perlu penerapan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (Wahyudi *et al.*, 2019).

Kemudian pada tataran kebijakan, Indonesia menggunakan dua indikator pengukuran stabilitas sistem keuangan yakni mikroprudensial dan makroprudensial. Indikator mikroprudensial diantaranya adalah: rasio kecukupan modal perbankan, kualitas aset, manajemen sistem keuangan yang sehat, pendapatan dan keuntungan bank, aspek likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar dan beberapa indikator berbasis pasar. Sementara itu, indikator makroprudensial diantaranya: pertumbuhan ekonomi, *balance of payment*, tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar, *contagion effect* atau efek menular krisis, serta faktor-faktor lain (Sitorus *et al.*, 2022). Kebijakan moneter berperan sebagai alat untuk menjamin stabilitas perekonomian di Indonesia yang nantinya juga akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Ekonomi yang stabil akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam perekonomian dan dalam jangka panjang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Abdurrahman, 2024).

Dalam suatu Negara, peran Bank Sentral sangat penting khususnya untuk memelihara stabilitas keuangan, yang meliputi peran dalam memelihara kestabilan nilai mata uang dan stabilitas sistem perbankan, *the role of the central bank at this stage is crucial. The central bank is required fundamentally to maintain financial stability. This involves not only maintaining the internal and external value of the currency, but also the stability of the banking system.* Peranan Bank Sentral pada tahap ini adalah penting. Bank

Sentral pada dasarnya diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini berarti tidak hanya untuk menjaga internal dan eksternal nilai mata uang, tetapi juga stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya, peran Bank Sentral sebagai LoLR yang dilakukan dengan mengintervensi dalam krisis perbankan lebih ditujukan pada dampak moneter dan keuangan insolvent (Pinem *et al.*, 2021). Berdasarkan fenomena yang ada serta kajian - kajian empiris sebelumnya, masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai peran bank sentral terhadap stabilitas keuangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif bagaimana peran bank sentral di Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga yang misinya adalah mengatur sistem keuangan suatu negara dan memastikan berfungsinya sistem tersebut dengan baik. Di Negara Indonesia ini, Bank Indonesia adalah bank sentral yang berwenang menerbitkan dan mengelola sebuah mata uang, menentukan kebijakan moneter, dan mempertahankan stabilitas di sektor perbankan. Bank sentral mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas perekonomian suatu negara. Bank sentral merupakan sebuah organisasi yang bertindak seperti regulator dan penyedia mekanisme dalam pembayaran dan mempunyai sebuah tanggung jawab untuk menjalankan dan menyetujui sistem pembayaran serta menerbitkan izin (Ilmi *et al.*, 2024).

Stabilitas Sistem Keuangan

SSK adalah sistem keuangan yang stabil yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan. SSK adalah ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran resiko tetap berjalan dengan semestinya menurut Bank Indonesia (Warjiyo, 2007).

Peranan Bank Indonesia dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral di Indonesia memiliki tugas untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang mana stabilitas sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Hal ini terdapat dalam dalam pasal 7 UU no 3 tahun 2004 dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan Rupiah memiliki dua aspek. Aspek pertama yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang dapat dilihat dari laju inflasi. Dan aspek kedua yaitu kestabilan perkembangan kurs Rupiah. Tujuan kebijakan moneter pertama berdasarkan UU no 3 tahun 2004 yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat stabilitas perekonomian didalam negara, karena inflasi akan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Karena Jika perekonomian tidak stabil maka pengeluaran di daerah akan tinggi dan memperumit spekulasi tentang apa yang terjadi (Rangkuty *et al.*, 2022).

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki lima peranan utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peranan utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu menurut Bank Indonesia (2007) adalah: Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi atau sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF) (Rahmadani & Aimon, 2022).

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran (Handayani *et al.*, 2021).

Strategi Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan strategi monitoring stabilitas sistem keuangan dan solusi bila terjadi krisis. Strategi BI dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan mencakup Koordinasi dan kerjasama; Upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga oleh instansi terkait lainnya. Jadi berbagai instrumen dalam stabilitas sistem keuangan, tidak hanya ditentukan oleh bank sentral, tetapi juga oleh otoritas lainnya (Bank Indonesia, 2007). Untuk pengelolaan informasi dan efektivitas kebijakan dalam stabilisasi sistem keuangan, maka perlu adanya koordinasi antara lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan, dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa koordinasi sulit terjadi apabila fungsi pengawasan & pengaturan perbankan dipisahkan dari bank sentral. Namun jika pemisahan terpaksa harus dilakukan, maka koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan bank sentral (Bank Indonesia), otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum (Ilmi *et al.*, 2024).

Pemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan untuk mampu mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini ini, pencegahan terjadinya instabilitas keuangan yang mematikan perekonomian dapat dilakukan melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah. Pemantauan stabilitas keuangan merupakan tugas bank sentral yang merupakan satu kesatuan dalam menjaga stabilitas keuangan (Merinaldi, 2018). Ada dua indikator utama yang menjadi target pemantauan, yakni indikator *microprudential* dan indikator makroekonomi. Kedua indikator tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem keuangan dan ekonomi. Pemantauan indikator *microprudential* dilakukan terhadap kondisi mikro institusi keuangan dalam sistem keuangan. Melalui pemantauan ini dapat diketahui potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan rentabilitas institusi keuangan, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Pemantauan indikator makroekonomi juga perlu dilakukan terhadap kondisi makroekonomi domestik maupun internasional yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan (Hasanah *et al.*, 2024).

Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan adalah Indikator *Microprudential* (Agregat); kecukupan modal; rasio modal agregat; kualitas aset. indikator makroekonomi; pertumbuhan ekonomi; tingkat pertumbuhan agregat; sektor ekonomi yang jatuh; BOP; defisit neraca berjalan; kecukupan cadangan devisa; pinjaman luar negeri, dll. Pencegahan krisis; pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan

dalam sistem keuangan (Rusdiyana R., 2021). Terdapat berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Langkah-langkah tersebut diadopsi dari standar/regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga – lembaga internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF), *Bank for International Settlement* (BIS), maupun asosiasi profesional lainnya (Wiku & Ayuningtyas, 2021)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (metode *content analysis*) yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti (Iskandar, 2009)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman dalam penyelamatan sistem keuangan / Perbankan Nasional di masa krisis keuangan dan perbankan yang terjadi tahun 1997-1998 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai pentingnya penciptaan suatu kerangka stabilitas sistem keuangan dimana stabilitas sistem keuangan merupakan suatu rangkaian proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan (*surveillance*) dan identifikasi kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan krisis tersebut terjadi. Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah preventif dan antisipatif dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis (*crisis resolution*) (Raharjo, 2002). Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari Bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Stabilitas keuangan bergantung pada lima elemen terkait yakni: lingkungan makro-ekonomi yang stabil; lembaga finansial yang dikelola baik; pasar finansial yang efisien; kerangka pengawasan prudensial yang sehat; sistem pembayaran yang aman dan handal. Pengalaman krisis tersebut bagi Bank Indonesia dapat dijadikan suatu pelajaran penting bahwa tugas bank sentral sebagai penjaga stabilitas moneter (otoritas moneter) tidaklah cukup tanpa dukungan stabilitas sistem keuangan yang sehat. Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank, merupakan salah satu sumber instabilitas. Oleh karena itu, krisis perbankan harus dicegah atau ditangani untuk menghindarkan gangguan terhadap sistem pembayaran dan arus kredit dalam perekonomian (Herawati *et al.*, 2024).

Terkait dengan hal tersebut, upaya membangun sistem keuangan yang stabil memerlukan perangkat aturan hukum (*legal framework*) yang mampu menjadi landasan bagi penyelenggaraan fungsi bank sentral secara utuh. Sebagaimana telah dipahami bahwa dalam *Legal framework* sistem keuangan dan perbankan nasional yang berlaku pada masa terjadinya krisis, bank sentral yang pada waktu itu merupakan bagian dari otoritas perbankan tidak dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai ketika harus mengambil tindakan darurat guna mengatasi *systemic risk* di sektor perbankan yang hampir saja melumpuhkan sistem perbankan nasional. Upaya mengatasi krisis perbankan pada masa itu dianggap perlu menggunakan dua pendekatan yaitu: Perlunya mem-back-up sistem perbankan nasional agar tidak *collaps*; Membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor korporasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional (Noor, 2022)

Tantangan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Di Indonesia

Tantangan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Di Indonesia (Agung & Juhro, 2016), antara lain:

- a. Perekonomian global, Dengan siklus keuangan global yang melonggar perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembiayaan ekonomi.
- b. Meningkatnya risiko operasional dari digitalisasi keuangan. Ancaman siber yang semakin terus terjadi, dengan intensitas dan kompleksitas yang meningkat. Serta meningkatnya fraud yang merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat, dan risiko operasional dari layanan penyedia teknologi kritikal.
- c. Risiko iklim terus mengarah pada risiko transisi yang semakin nyata, seperti penurunan nilai aset berbasis energi fosil, ataupun kesulitan pendanaan akibat aktivitas bisnis yang bersifat brown.

Strategi Bank Indonesia Mengatasi Krisis

Strategi Bank Indonesia dalam mengatasi Krisis Keuangan dan Perbankan Nasional (Tambunan *et al.*, 2024), antara lain:

- a. Bank Indonesia memfungsikan peranannya selaku "*lender of resort* " dengan memberikan *Liquidity support* dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk menyelamatkan sistem perbankan, baik untuk keperluan mengatasi kesulitan likuiditas, maupun dalam rangka pelaksanaan Program Penjangjian Pemerintah.
- b. Bank Indonesia harus terlibat untuk membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi oleh sektor korporasi selaku debitur bank.
- c. Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat (LOLR).

- d. Membentuk institusi yang menjamin deposit kecil (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pengganti *Blanket Guarantee* yang tidak *best practice*. Bank Indonesia berperan aktif dalam persiapan pendirian LPS.
- e. Membentuk wadah terkoordinasi terkait dengan stabilitas sistem keuangan baik secara internal dan eksternal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Stabilitas sistem keuangan merupakan elemen krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ini melalui berbagai kebijakan dan instrumen, termasuk pengaturan suku bunga, pengawasan lembaga keuangan, dan pengembangan sistem pembayaran yang aman. Pengalaman krisis keuangan di masa lalu menunjukkan bahwa ketidakstabilan dapat mengakibatkan biaya yang sangat tinggi bagi perekonomian, sehingga penerapan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis di sektor keuangan.

Selain itu, pencapaian stabilitas sistem keuangan tidak hanya bergantung pada tindakan Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan kerjasama dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Dengan menerapkan regulasi yang ketat, disiplin pasar, serta pemantauan risiko secara efektif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investor dan nasabah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, J., & Juhro, S. M. (2016). Managing monetary and financial stability in a dynamic global environment: Bank Indonesia's policy perspectives. *BIS Paper*, 88(88), 157–188.
- Handayani, M., Talbani Farliani, Riski Fandika, & Indah Islami. (2021). Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 171–182. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515>
- Hasanah, N., Khairunnisa, S. A., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., & Serang, K. (2024). Peran bank sentral dalam mengatur stabilitas sistem keuangan di era ekonomi digital. 2(12).

- Herawati, J. W., Astuti, R. P., Khildina, I. W. Al, & Hasanah, W. (2024). Peranan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas keuangan. *Juni*, 2(6), 578.
- IImi, V. A., Astutik, L. B., Hasanah, W., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Fakultas, S. J., Dan, E., & Islam, B. (2024). Peran bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 58–61. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Noor, A. (2022). The legal regulatory framework of sharia securities crowdfunding in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 433–444. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.433-444>
- Pinem, J., Mamengko, R. S., & Tamponanggoy, G. H. (2021). Kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, IX(12), 184–193.
- Rahmadani, F., & Aimon, H. (2022). Analisis dampak instrumen kebijakan moneter terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(4), 21. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i4.14058>
- Rangkuty, D. M., Bakhtiar Efendi, & Antonius Gulo. (2022). Monetary indicators of the stability of prices. *Proceeding of the International Conference on Economics and Business*, 1(1), 92–102. <https://doi.org/10.55606/iceb.v1i1.187>
- Sitorus, A. P., Mahlel, Majid, M. S. A., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Krisis keuangan masa depan dan sistem keuangan baru. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 136–146. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561>
- Tambunan, B. A. Y., Harahap, I., Nabillah, R., & Silaban, P. S. (2024). Peranan dan strategi Bank Indonesia serta pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 174–181. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1601>
- Wahyudi, S. T., Nabella, R. S., & Badriyah, N. (2019). Analisis pengaruh siklus keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 87. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.2.87-95>
- Warjiyo, P. (2007). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. 1–44.
- Wiku, F., & Ayuningtyas, F. J. (2021). Determinan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui pendekatan makroekonomi. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 214. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i2.12409>